

BAB I

PENDAHULUAN

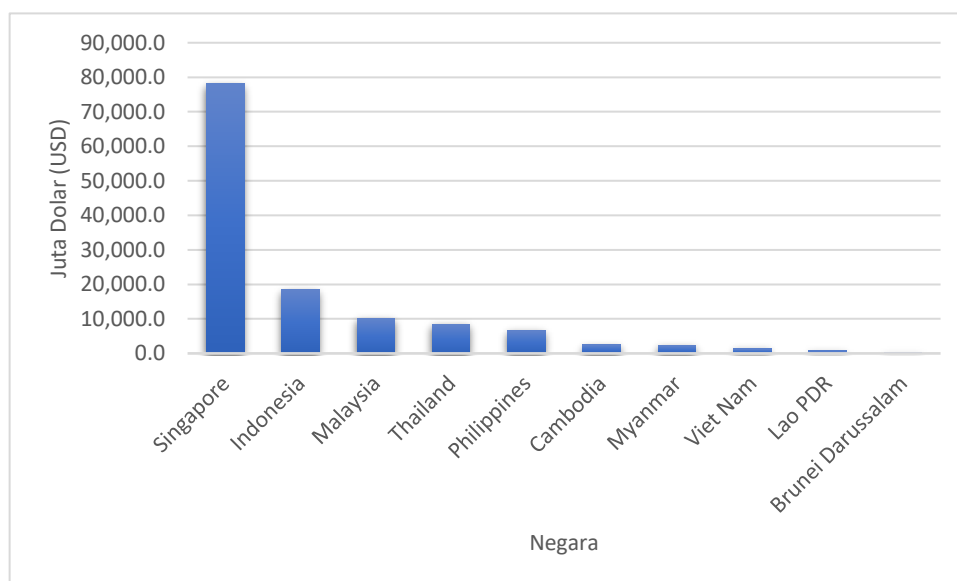
1.1 LATAR BELAKANG

Foreign Direct Investment (FDI) adalah "investasi lintas batas yang dilakukan oleh investor di suatu negara terhadap suatu perusahaan di negara lain, dengan tujuan membangun kepentingan jangka panjang di negara yang dituju" (Alfaro & Chauvin, 2017). Negara tempat investasi yang dituju disebut *host country*, sementara negara asal perusahaan yang menanam modal disebut *home country* (Ellimäki et al., 2022). Setelah tahun 1990an, FDI mendapat perhatian yang signifikan karena potensi dan manfaatnya bagi negara asal investasi maupun negara tuan rumah (OECD 2017). Menurut Fazaalloh (2024), ada banyak alasan mengenai pentingnya FDI yang dapat memberikan manfaat, antara lain: (1) dapat melengkapi kekurangan modal dalam negeri, (2) dapat mendorong terjadinya transfer teknologi yang meningkatkan produktivitas dan inovasi, (3) mendorong terjadinya *transfer of knowledge* sehingga penerima FDI dapat meningkatkan skill dan kualitas sumberdaya manusia di negara tuan rumah, serta (4) menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada nantinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional negara tuan rumah.

Setiap negara membutuhkan aliran modal/investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional, juga guna meningkatkan aktivitas ekonomi. Di negara-negara berkembang, isu yang selalu menjadi prioritas utama adalah sumber daya modal investasi domestik yang terbatas, sehingga aliran FDI sangat diperlukan. Menurut Tyrkba & Yashina (2021) sebagian besar negara berkembang menghadapi kekurangan modal, khususnya di negara-negara berkembang di

ASEAN. Analisis ini mendukung argumen dominan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara FDI dan kegiatan ekonomi di ASEAN.

Dalam dua dekade terakhir, ASEAN telah menarik perhatian dunia melalui pertumbuhannya yang dinamis dan stabil. Namun pertumbuhan ekonomi yang stabil ini tidak didukung dengan FDI *inflow* yang tinggi ke negara berkembang ASEAN. Hal ini sependapat dengan penelitian Dang & Nguyen (2021) bahwa permintaan FDI yang tinggi di negara ASEAN akibat karena rendahnya tingkat tabungan domestik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan aliran FDI yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Berikut adalah rata-rata FDI di masing-masing negara ASEAN tahun 2010-2022:



Sumber: World Bank (Data diolah)

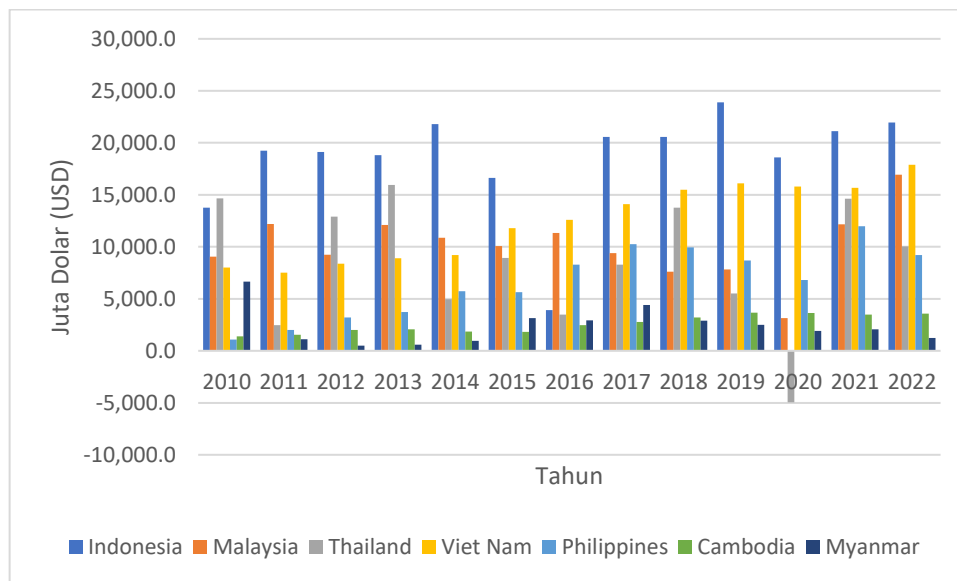
Gambar 1.1
Rata-Rata FDI Di Masing-Masing Negara ASEAN Tahun 2010-2022

Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata FDI di masing-masing negara ASEAN tahun 2010-2022, arus masuk FDI ke negara-negara ASEAN masih sangat didominasi oleh negara Singapura, selebihnya sembilan negara lainnya menerima FDI yang secara keseluruhan jumlahnya masih lebih kecil dari Singapura. Kondisi

arus masuk FDI ke ASEAN menunjukkan adanya kecenderungan yang tidak merata antara Singapura dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Jika dibandingkan, secara konsisten Singapura menjadi negara penerima FDI terbesar di ASEAN. Aliran FDI ke Singapura sebesar 56 persen dari total FDI yang masuk ke kawasan ASEAN. Sementara negara-negara berkembang di ASEAN mendapatkan aliran FDI yang masih sangat kecil.

Teori neoklasik mengungkapkan, modal mengalir “*downhill*” dari negara dengan kelebihan modal (*capital abundant*) ke negara dengan kekurangan modal (*capital scarce*). Dengan asumsi bahwa negara-negara dengan kekurangan modal menawarkan tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi, investor asing cenderung mengalihkan perhatian mereka untuk melakukan investasi di negara-negara tersebut (Qolbi & Kurnia, 2015). Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari *world bank* aliran FDI yang masuk ke negara-negara berkembang ASEAN masih sangat rendah dibandingkan negara Singapura yang termasuk kategori negara maju di ASEAN.

Objek pada penelitian ini adalah negara-negara ASEAN-7 (Kamboja, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam). Kriteria pemilihan negara yaitu (1) kondisi arus masuk FDI di negara-negara ASEAN-7 yang cenderung rendah (UNCTAD 2023), (2) merupakan negara berkembang di ASEAN, (3) Menurut laporan Marsh (2019) negara ASEAN-7 termasuk dalam kategori risiko politik yang tinggi dan menengah di ASEAN. Brunei Darussalam, Laos dan Singapura tidak termasuk dalam kelompok studi ini. Laos dan brunei memiliki keterbatasan data dan Singapura diklasifikasikan sebagai outlier karena merupakan negara maju. Data yang dipublikasikan *World Bank* menunjukkan perkembangan FDI di ASEAN-7 dalam 13 tahun terakhir:



Sumber: World Bank (Data diolah)

Gambar 1.2
Perkembangan FDI Di Masing-Masing Negara ASEAN-7 Tahun 2010-2022

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan FDI di masing-masing negara berkembang ASEAN-7. Perkembangan FDI pada negara ASEAN-7 memiliki perbedaan di masing-masing negara. Dari ketujuh negara tersebut, Indonesia memiliki FDI yang paling tinggi, dimana pada tahun 2019 FDI Indonesia mencapai 23,8 juta dolar. Hal tersebut disebabkan Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk terbesar di ASEAN dan keempat dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, biaya tenaga kerja tidak mahal, Indonesia memiliki stabilitas politik, hukum dan kebijakan, dan memiliki energi baru terbarukan yang besar sehingga menjadi daya tarik investor (Karno, 2014).

Pada negara Vietnam aliran FDI terus konsisten meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 aliran FDI ke Vietnam mencapai titik teringginya. FDI Malaysia bergerak fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 Malaysia berhasil mencapai FDI tertingginya yaitu sebesar 17, 9 juta dolar. FDI Negara Myanmar merupakan yang paling rendah dibanding negara ASEAN-7 lainnya, perkembangan FDI di Myanmar stagnan dari tahun ke tahun. Fenomena

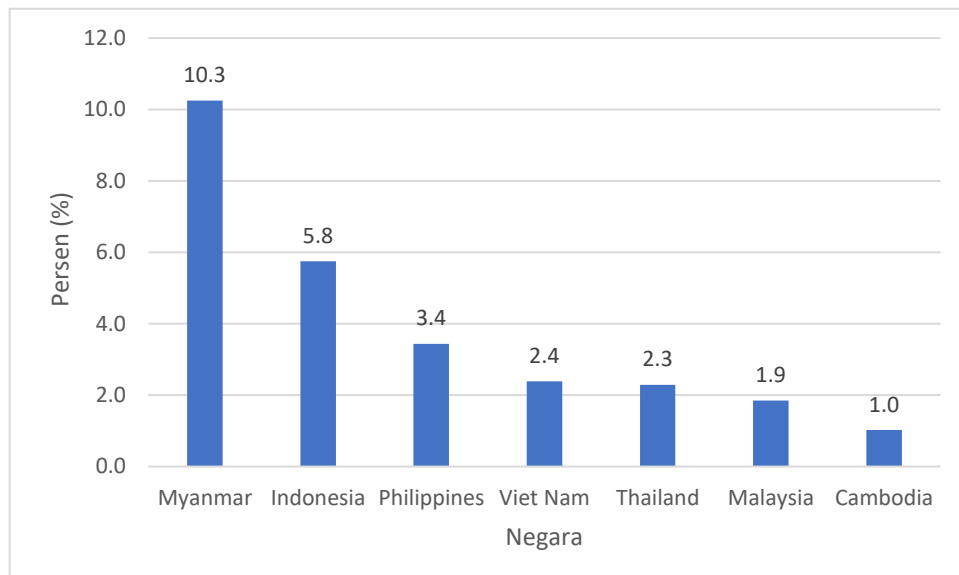
perkembangan arus FDI yang fluktuatif negara berkembang ASEAN tersebut diindikasikan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal.

Menurut Dal Bianco & Loan (2017), faktor internal yang mempengaruhi arus masuk FDI ke suatu negara meliputi 2 hal yaitu risiko ekonomi dan risiko politik, antara lain: ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, *trade openness*, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, sumber daya manusia, supremasi hukum, demokrasi, stabilitas politik, dan korupsi. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi masuknya FDI antara lain: (1) Pandemi COVID-19, dimana pandemi ini telah mempengaruhi aliran masuk FDI, dengan meningkatnya proteksionisme dan kekhawatiran lainnya yang mengikis kepercayaan investor (Al-kasasbeh et al., 2022), (2) Resesi ekonomi global yang menyebabkan investor kemudian menarik kembali modalnya (Aimon et al, 2017).

Menurut Gumelar (2019) aliran FDI ke suatu negara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik di negara tuan rumah. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat meningkatkan ketidakpastian dan potensi kerugian investasi. Menurut ICRG (2018), risiko ekonomi dapat memengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya ke suatu negara. Risiko ekonomi mengacu pada kemungkinan terjadinya dampak buruk akibat kesulitan negara tuan rumah dalam mencapai tujuan makroekonomi termasuk melambatnya pertumbuhan PDB, tingkat suku bunga yang tinggi, tingkat inflasi yang tinggi, dan kebijakan perdagangan yang terbatas.

Salah satu indikator yang mempengaruhi masuknya FDI ke suatu negara adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga di setiap negara mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral atau pengatur kebijakan moneter negara tersebut. Tingkat suku bunga suatu negara dianggap

memiliki pengaruh terhadap jumlah FDI yang masuk dalam perekonomian. Teori ekonomi tentang mobilitas modal internasional menunjukkan bahwa modal akan berpindah ke negara-negara yang menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga dunia. Hal ini mencerminkan bahwa investasi didistribusikan diantara negara-negara yang menawarkan tingkat pengembalian yang baik dan keamanan dalam bentuk suku bunga (Aijaz et al., 2014). Berikut adalah rata-rata suku bunga di masing-masing negara ASEAN-7 tahun 2010-2022:



Sumber: World Bank (Data diolah)

Gambar 1.3
Rata-Rata Tingkat Suku Bunga ASEAN-7 Tahun 2010-2022

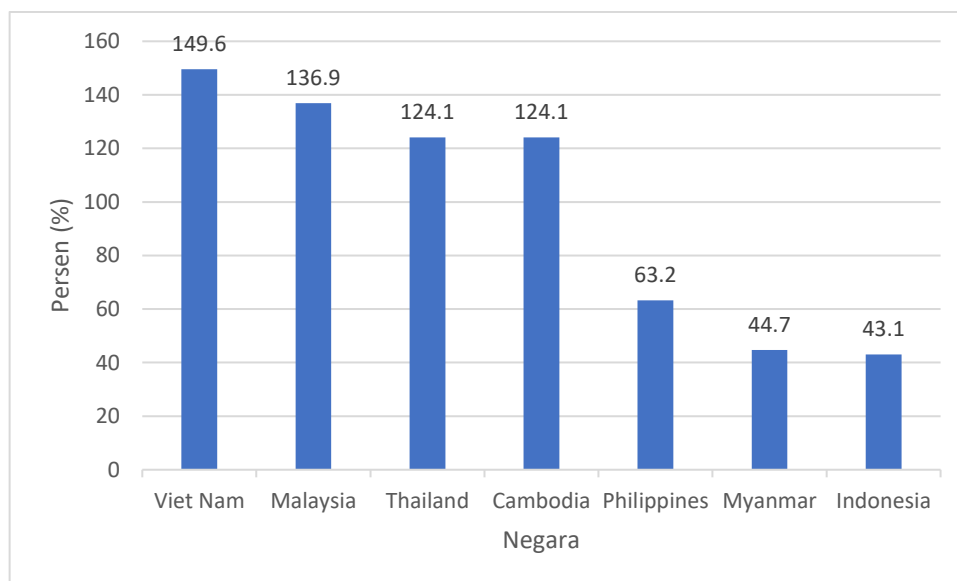
Menurut Wibowo (2019), tingkat suku bunga mencerminkan biaya investasi, sehingga memiliki korelasi negatif dengan FDI di negara tertentu. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi menunjukkan biaya investasi yang lebih tinggi. Sehingga semakin tinggi tingkat suku bunga, maka FDI akan menurun di negara tersebut. Gambar 1.3 menunjukkan tingkat suku bunga di Myanmar tertinggi sebesar 9.88 persen. Tingginya suku bunga di Myanmar disebabkan oleh

penurunan kinerja perekonomian akibat terjadinya krisis politik dan kemanusiaan yang tak berkesudahan (Ardikaningtyas et al., 2023). Sedangkan tingkat suku bunga di Cambodia merupakan yang terendah di ASEAN-7 yaitu sebesar 0,97 persen.

Hubungan tingkat bunga dengan investasi menurut Keynes dapat dilihat dari *Marginal Efficiency of Capital* (MEC). Hubungan antara tingkat bunga dan investasi menurut Keynes menunjukkan bahwa investasi akan meningkat ketika tingkat pengembalian modal (MEC) lebih besar daripada suku bunga yang berlaku. Hal ini mencerminkan keputusan rasional para investor yang mempertimbangkan potensi keuntungan dibandingkan dengan biaya pinjaman. Oleh karena itu, peningkatan tingkat bunga akan menghambat pertumbuhan investasi, dan sebaliknya, kenaikan investasi akan didorong oleh penurunan tingkat suku bunga. Ini sependapat dengan penelitian Aijaz et al (2014), dimana suku bunga mempunyai hubungan negatif dengan FDI di Thailand, Indonesia dan Malaysia.

Trade openness juga dapat dianggap sebagai risiko ekonomi yang mempengaruhi FDI, karena kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi iklim investasi dan risiko ekonomi secara keseluruhan (Igamo, 2015). Kerangka kebijakan perdagangan yang terbatas menyebabkan arus masuk FDI menjadi tidak signifikan (Zaman et al., 2018). *Trade openness* adalah derajat keterbukaan dalam hubungan internasional antarnegara. Perluasan pasar, transfer pengetahuan dan teknologi baru, dan peningkatan arus modal global adalah beberapa manfaat dari *trade openness* (Purwanto, 2011). Kondisi ini menawarkan peluang bagi investor asing untuk berinvestasi atau mendirikan perusahaan di negara target dengan keunggulan komparatif (Azizah et al., 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *trade openness* memiliki hubungan kompleks

dengan FDI. Misalnya, penelitian Zaman *et al* pada tahun 2017, menunjukkan bahwa peningkatan *trade openness* akan meningkatkan aliran masuk FDI dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa *trade openness* berpengaruh terhadap FDI (Lien, 2021). Berikut adalah rata-rata *trade openness* di masing-masing negara ASEAN-7 tahun 2010-2022:



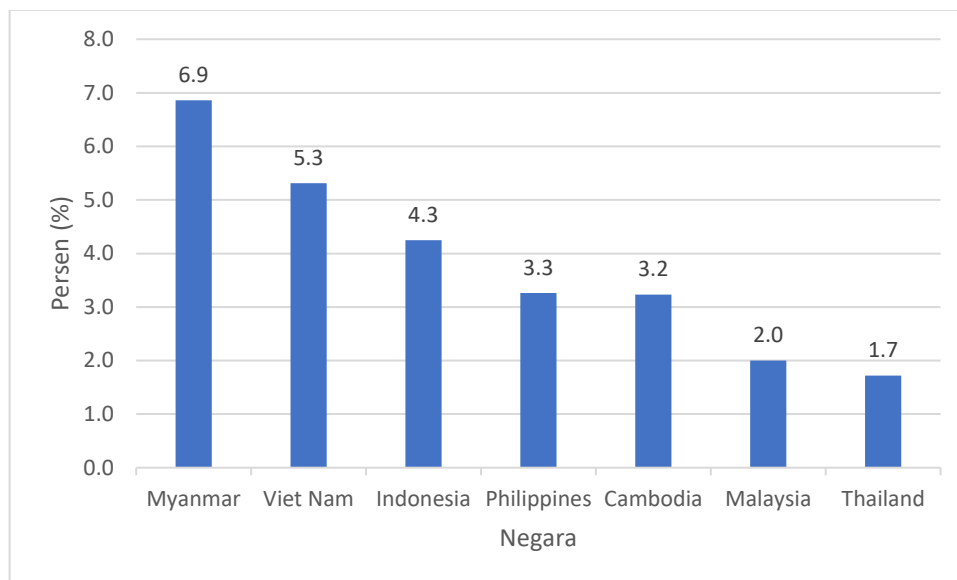
Sumber: Our World in Data (Data diolah)

Gambar 1.4
Rata-Rata Trade Openness ASEAN-7 Tahun 2010-2022

Gambar 1.4 menunjukkan rata-rata *trade openness* ASEAN-7 tahun 2010-2022. *Trade openness* merupakan sebuah rasio yang mengukur tingkat keterbukaan perdagangan suatu negara. Jika angka rasionya semakin tinggi, maka semakin besar pula tingkat keterbukaan perdagangannya. Pada gambar diatas, rata-rata persentase *trade openness* negara yang tertinggi adalah Vietnam yaitu sebesar 149,6 persen, sedangkan persentase *trade openness* terendah adalah Indonesia yaitu sebesar 43,1 persen.

Disamping *trade openness*, resiko ekonomi selanjutnya adalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam

perekonomian. Inflasi juga menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam kebijakan makro, yang dapat mengurangi daya tarik investor asing. Penelitian yang dilakukan Salehnia et al (2019) menemukan bahwa pengaruh tingkat inflasi terhadap daya tarik FDI adalah negatif, tetapi hasil tersebut berbeda dengan penelitian Alshamsi (2015) karena ditemukan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap arus masuk FDI. Berikut adalah rata-rata tingkat inflasi di masing-masing negara ASEAN-7 tahun 2010-2022:



Sumber: World Bank (Data diolah)

Gambar 1.5
Rata-Rata Inflasi ASEAN-7 Tahun 2010-2022

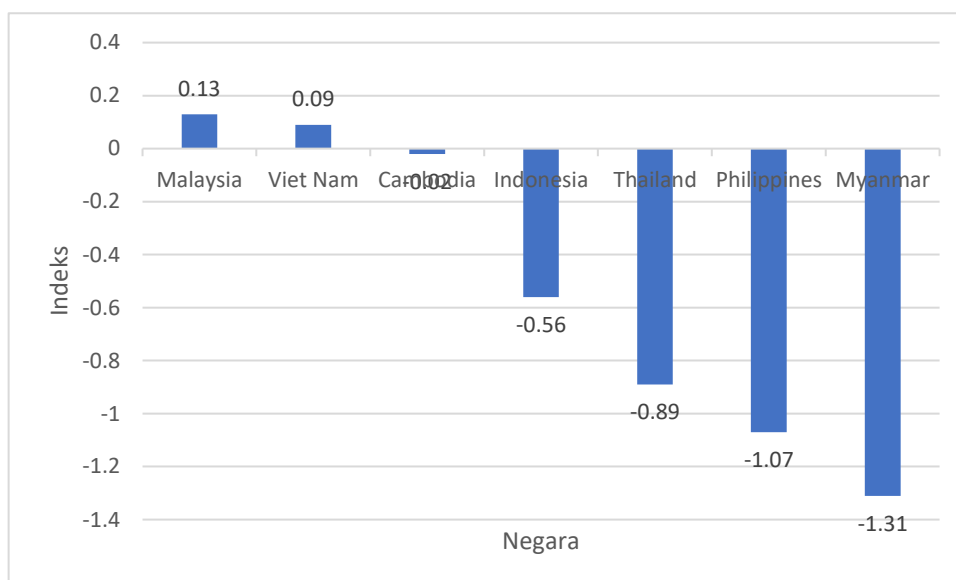
Gambar 1.5 menunjukkan bahwa rata-rata Tingkat inflasi negara Myanmar tertinggi dibandingkan negara lain di ASEAN-7, dengan tingkat inflasi sebesar 6,9 persen. Tingginya inflasi di Myanmar disebabkan oleh kudeta militer pada februari 2021. Harga bahan makanan dan bahan bakar meningkat tinggi, menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Tingkat inflasi tertinggi posisi kedua terjadi di Vietnam dengan tingkat inflasi sebesar 5,3, sedangkan Tingkat inflasi negara Thailand terendah yaitu sebesar 1,2 persen.

Selain resiko ekonomi, risiko yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan FDI adalah *political risk* atau risiko politik. Risiko politik adalah risiko yang terjadi karena gangguan politik di suatu negara yang dapat mempengaruhi perekonomian negara terkait. (Sottilotta, 2017). Risiko politik mengacu pada kemungkinan munculnya konsekuensi akibat lemahnya kualitas kelembagaan, tingginya korupsi, buruknya stabilitas politik, dan kurangnya akuntabilitas demokrasi (Gokmenoglu et al., 2019). Semakin tinggi risiko politik, semakin tinggi kemungkinan bahwa investasi di negara tuan rumah akan menurun. Oleh karena itu, risiko politik dapat dikatakan sebagai faktor signifikan yang mempengaruhi FDI (Mustaque et al., 2013). Resiko politik seperti tingginya konflik, teror politik, korupsi, otoritarianisme, dan lemahnya aturan hukum juga cenderung meningkatkan risiko dan memperburuk stabilitas politik, sehingga mengurangi minat investor (Staats & Biglaiser, 2012).

Negara-negara di seluruh dunia memiliki tingkat risiko politik yang sangat beragam, mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, tidak terkecuali ASEAN. Menurut laporan Marsh (2019) ASEAN merupakan kawasan yang memiliki risiko politik yang tinggi hingga rendah. Misalnya, Singapura memiliki tingkat risiko politik yang rendah, sedangkan Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam memiliki tingkat risiko politik yang menengah, dan Kamboja, Laos, dan Myanmar memiliki tingkat risiko politik yang tinggi.

Lingkungan politik dan sosial yang tidak stabil tidak kondusif untuk masuknya aliran FDI. Kekhawatirannya adalah bahwa perubahan besar dan tak terduga besar dari kerangka hukum dan fiskal dapat secara drastis mengubah hasil ekonomi dari investasi tertentu (Mathieson, 1990). Stabilitas politik merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor dalam memilih

negara tempat mereka melakukan investasi. Investor cenderung tidak melakukan FDI dan mempertaruhkan modalnya dalam suatu negara yang memiliki kondisi politik yang tidak stabil dikarenakan nantinya investor akan menghadapi beberapa gangguan seperti kerusuhan, perampasan properti, dan ancaman terhadap keselamatan personel. Risiko ini dapat mempengaruhi operasi bisnis dan mengakibatkan kerugian finansial bagi investor. Berikut adalah rata-rata indeks stabilitas politik di masing-masing negara ASEAN-7 tahun 2010-2022:



Sumber: World Bank (Data diolah)

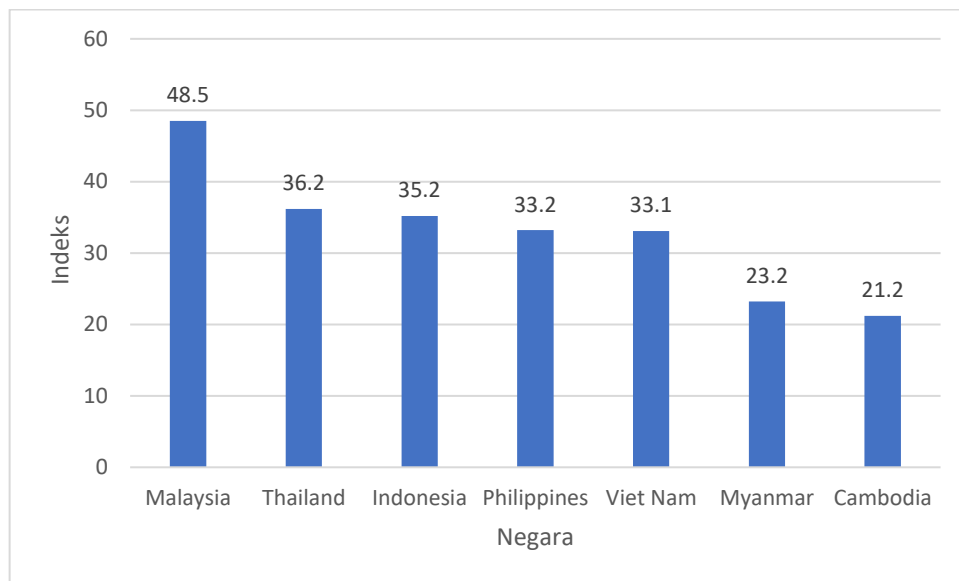
Gambar 1.6
Rata-Rata Indeks Stabilitas Politik ASEAN-7 Tahun 2010-2022

Stabilitas politik adalah kondisi pemerintahan di suatu negara yang dapat bertahan ditengah gejolak politik (Kurul & Yalta, 2017). Stabilitas politik biasanya timbul ketika pemerintah berhasil menangani krisis dan mengontrol masyarakatnya dengan baik. Gambar 1.6 menunjukkan stabilitas politik negara Myanmar terendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan. Pertama, Kudeta militer yang dilakukan oleh junta militer Myanmar pada tahun 2021 telah mengganggu stabilitas politik di negara tersebut.

Kedua, Myanmar telah mengalami krisis politik yang kronis, dengan krisis politik yang terjadi pada tahun 2021 sebagai bagian dari krisis politik yang lebih luas (Hidriyah, 2021).

Selanjutnya konsekuensi dari korupsi adalah dapat menimbulkan risiko politik yang menghambat pengambilan keputusan investasi asing, karena investor asing mungkin menolak pemerintah yang melibatkan transparansi, nepotisme, dan penyalahgunaan (Pierre, 2015). Saat ini, buruknya kualitas kelembagaan juga menjadi permasalahan global, tidak hanya di setiap negara namun juga di seluruh kawasan yang berdampak pada banyak aspek perekonomian. Kualitas kelembagaan yang buruk menyebabkan terjadinya korupsi.

Secara teoritis, korupsi dapat dilihat sebagai “perebutan tangan” karena meningkatkan risiko biaya transaksi dan menghambat arus masuk FDI. Namun, korupsi terkadang bertindak sebagai “uluran tangan” karena hal ini membantu melumasi roda perdagangan di negara-negara yang institusinya masih sangat administratif dan rumit. Akibatnya, bisnis memperoleh lebih banyak keuntungan ketika mereka hanya mengeluarkan sejumlah kecil uang untuk mendapatkan informasi dan manfaat penting (Heckelman & Powell, 2010). Berikut adalah rata-rata indeks persepsi korupsi di masing-masing negara ASEAN tahun 2010-2022:



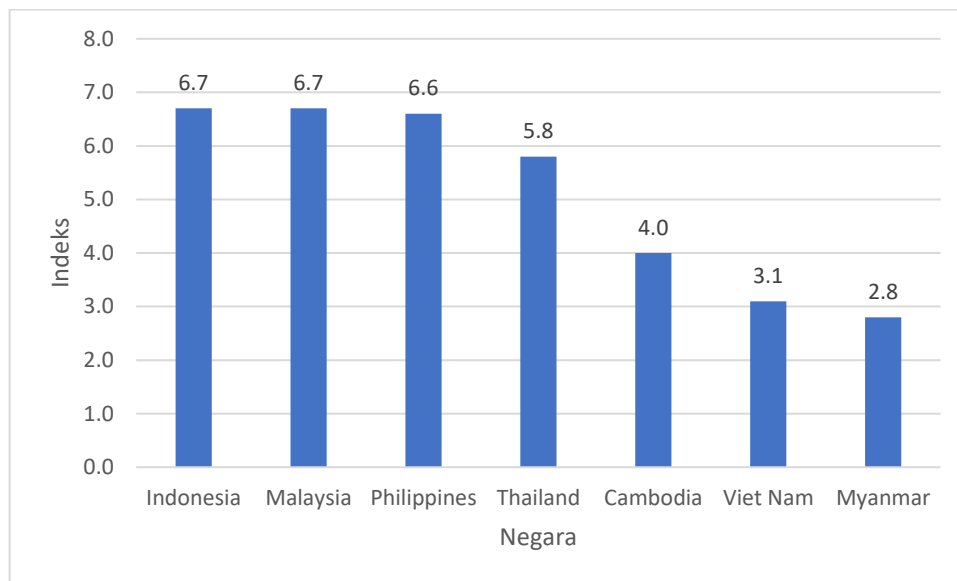
Sumber: *Tranparancy International (Data diolah)*

Gambar 1.7
Rata-Rata Indeks Persepsi Korupsi ASEAN-7 Tahun 2010-2022

Gambar 1.7 menunjukkan bahwa rata-rata indeks persepsi korupsi negara kamboja paling rendah dengan skor rata-rata 21,1. Kamboja telah mengalami korupsi yang kronis, dengan korupsi yang meluas ke berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. Korupsi telah menjadi bagian dari budaya dan struktur sosial di Kamboja, sehingga cukup sulit untuk diatasi. Posisi kedua diikuti oleh Myanmar. Hal tersebut karena kegagalan dalam regulasi dan penegakan hukum, korupsi tumbuh subur di setiap sektor pemerintahan dan bisnis. Banyak pengusaha asing menganggap korupsi sebagai "hambatan serius bagi investasi dan perdagangan di Myanmar (Argawati, 2023).

Menurut (Hadhek et al., 2015), kebebasan sipil berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta hak-hak politik yang lebih dihargai akan meningkatkan investasi. Rezim otoriter dalam jangka pendek akan menghambat investasi karena kekhawatiran investor pada program pemerintah dalam jangka panjang. Peningkatan atau penurunan demokrasi di suatu negara mempengaruhi

FDI di negara tersebut (Ahmed et al., 2023). Oleh sebab itu, negara ASEAN harus mengembangkan lembaga-lembaga yang lebih demokratis untuk menarik aliran masuk FDI. Berikut adalah rata-rata indeks demokrasi di masing-masing negara ASEAN tahun 2010-2022:



Sumber: World Bank (Data diolah)

Gambar 1.8
Rata-Rata Indeks Demokrasi ASEAN-7 Tahun 2010-2022

Gambar 1.8 menunjukkan rata-rata indeks demokrasi negara Malaysia tertinggi sebesar 6,83 persen. Sementara demokrasi di Myanmar terendah sebesar 3.02 persen. Salah satu alasan mengapa demokrasi Myanmar rendah adalah bahwa komisi pemilu negara bagian Rakhine membatasi partisipasi orang dalam pemilu tahun lalu, terutama di daerah yang dikuasai oleh partai oposisi pemerintah. Karena konflik antara militer dan kelompok etnis minoritas terus terjadi, keamanan tidak terjamin. (Lidwina, 2021).

Upaya akademis untuk mengetahui pengaruh variabel risiko ekonomi terhadap FDI sering kali menghasilkan hasil yang beragam dan saling bertentangan. Gokmenlu *et al* (2019) Temuan empiris mengungkapkan bahwa perubahan risiko ekonomi di Turki secara signifikan menyebabkan perubahan arus

masuk FDI. Igamo (2015), Omankhalen (2011), Shahzad (2017) dan Alshamsi (2015) hasil penelitian menunjukkan inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap FDI. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustafa (2019) bahwa terdapat hubungan terbalik jangka panjang antara inflasi dan FDI, yang menunjukkan bahwa ketika inflasi meningkat, FDI menurun (Mustafa, 2019). Salehnia *et al* (2019) juga menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap FDI. Penelitian risiko ekonomi dengan indikator suku bunga terhadap FDI menghasilkan hasil yang berbeda. Penelitian Aijaz *et al* (2014) menemukan hubungan negatif antara suku bunga dengan FDI. Sementara (Faroh & Shen, 2015) menemukan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk menyelidiki hubungan antara risiko politik dengan FDI. Dari beberapa hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai pengaruh risiko politik dan FDI. Khan *et al* (2012) dan Elleuch *et al* (2015) berpendapat bahwa risiko politik berdampak negatif pada aliran masuk FDI ke negara tujuan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa negara-negara dengan risiko politik yang tinggi dapat membuat investor tidak lagi tertarik untuk berinvestasi di negara tersebut. Ini karena investor khawatir akan mengalami kerugian yang mungkin terjadi di negara terkait. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Dwinitasari & Sulasmiyati (2017) dan Salem & Younis (2021), yakni tidak ada pengaruh yang signifikan dari risiko politik terhadap FDI. Ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak faktor lain yang lebih penting bagi investor untuk menanamkan investasi mereka, seperti ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor-faktor lain yang dibutuhkan oleh investor. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat ditemui bahwa masih terdapat

inkonsistensi hasil penelitian pengaruh risiko ekonomi dan risiko politik terhadap FDI.

Peneitian yang dilakukan Igamo (2015) dan Anwar (2016) menggunakan metode penelitian *fixed effect model* untuk melihat pengaruh variabel risiko ekonomi terhadap FDI. Khan *et al* (2012) dan Wilujeng *et al* (2022) menggunakan metode penelitian *fixed effect model* untuk melihat pengaruh variabel risiko politik terhadap FDI. Amalia *et al* (2021) menggunakan metode penelitian *random effect model* untuk mengetahui pengaruh stabilitas politik dan indeks persepsi korupsi di Asia Tenggara. Untuk menambah literasi akademik penelitian ini menggunakan teknik analisis *Panel Corrected Standar Error* (PCSE).

Pada penelitian ini terdapat *research gap* yang termasuk pada kategori *empirical gap* dan *methodological gap*, dimana terdapat inkonsistensi hasil empiris yang telah dilakukan oleh studi-studi sebelumnya dan adanya keterbatasan metodologi yang diterapkan dalam penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis pengaruh risiko ekonomi terhadap FDI dan penelitian terdahulu lainnya menganalisis pengaruh risiko politik terhadap FDI. Namun jarang sekali studi terdahulu menggabungkan keduanya. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menggabungkan risiko ekonomi dan risiko politik yang diasumsikan berpengaruh terhadap FDI. Maka berdasarkan *gap research*, *novelty* dan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Risiko Ekonomi dan Risiko Politik terhadap Foreign Direct Investment di ASEAN-7**”.

Kontribusi yang diberikan oleh studi ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aliran masuk FDI, yang penting bagi kebijakan

investasi di berbagai negara khususnya ASEAN-7. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur akademis tentang FDI, risiko ekonomi, dan risiko politik. Temuan-temuan baru dapat memperkaya pemahaman teoritis dan empiris tentang hubungan antara faktor-faktor risiko dan FDI di berbagai konteks negara.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah variabel risiko ekonomi berpengaruh terhadap *foreign direct investment* di ASEAN-7?
2. Apakah variabel risiko politik berpengaruh terhadap *foreign direct investment* di ASEAN-7?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh risiko ekonomi terhadap *foreign direct investment* di ASEAN-7.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh risiko politik terhadap *foreign direct investment* di ASEAN-7.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap penelitian akademik dalam bidang ekonomi, membantu mengembangkan teori dan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi FDI di negara berkembang khususnya ASEAN-7.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana dapat mengurangi risiko ekonomi dan risiko

politik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan investasi bagi negara anggota ASEAN-7.